Materi ke-5

Kerangka Kekuasaan Dalam Pembuatan Keputusan

09 Maret 2020

Perspektif atau kerangka kekuasaan (*power*) memandang pembuatan keputusan kebijakan sebagai sesuatu yang dibentuk dan ditentukkan oleh struktur kekuasaan: kelas, orang kaya, tatanan birokratis, dan tatanan politik, kelompok penekan, dan kalangan professional atau ahli pengetahuan teknis. Ada enam pendekatan dan variannya dari kerangka kekuasaan yang dapat dipakai sebagai lensa dalam pembuatan keputusan kebijakan, yaitu : 1) *Elitism*: berfokus pada cara kekuasaan dikonsentrasikan; 2) *Pluralisme:* berfokus pada cara kekuasaan diditribusikan; 3) *Marxisme*: berfokus pada konflik kelas dan kekuasaan ekonomi; 4) *Korporatisme*: berfokus pada kekuasaan kepentingan yang terorganisir; 5) *Profesionalisme:* berfokus pada kekuasaan kalangan profesional; 6) *Teknokrasi*: berfokus pada kekuasaan pakar teknis (Parson,2006:250-251).

Kerangka proses pembuatan keputusan kebijakan *elitis* berpendapat bahwa kekuasaan terkonsentrasi ditangan segelintir orang atau kelompok. Menurut kerangka model ini pembuatan keputusan adalah, proses yang dilaksanakan demi keuntungan elite-elite tersebut. Sebagai sebuah model pembuatan keputusan, tujuan elitisme didasarkan pada analisis terhadap cara dunia riil berjalan. Dikatakan bahwa dalam dunia riil ada pihak-pihak yang berada di atas yang memegang kekuasaan dan ada massa yang tak memegang kekuasaan. Dalam perkembangannya, Laswelll (dalam Parson,2006: 252) mengatakan bahwa ada sirkulasi elite dan ada pergeseran yang terjadi dari perjuangan kelas ke perjuangan antar “kelompok-kelompok keahlian” yang berbeda, antara lain: (1). orang-orang yang terlatih menggunakan kekerasan (seperti, elite militer dan polisi); (2). orang-orang mempunyai keahlian komunikasi dan propaganda; (3). orang yang punya keahlian bisnis dan perdagangan; (4). “teknokrat” yang mempunyai pengetahuan teknis khusus; (5). birokrat yang mempunyai keahlian administrative dan organisasional.

Kerangka pembuatan keputusan kebijakan *pluralis dan neo-pluralis* yang disponsori oleh Charles Lindblom (dalam Parson 2006:255), melihat pembuatan keputusan kebijakan sebagai “*muddling through*”. Bersama seorang ahli yang bernama Dahl, mereka memodifikasi pandangannya bahwa pembuatan keputusan bukanlah kegiatan yang netral, tuntutan kepentingan bisnis mendominasi tuntutan kelompok lain. Karena itu proses pembuatan keputusan menurut pandangan baru mereka dibiaskan demi kepentingan pihak yang kuat, dan dimanfaatkan untuk kelompok yang kurang kuat. Pendekatan pluralis juga mengembangkan model baru yang bertujuan untuk menjelaskan evolusi proses dan struktur pembuatan kebijakan. Salah satu yang paling penting dari model ini adalah gagasan tentang jaringan dan komunitas kebijakan. Dikatakan oleh Smith (1993:74) bahwa ide jaringan/komunitas kebijakan, bagaimanapun, adalah bersifat *multi-theoritic* dan bisa diaplikasikan oleh pendekatan selain pluralism. Jika diaplikasikan dengan cara ini, model pluralis memberikan kerangka umum, dimana negara berusaha untuk membuat keputusan dengan mengelola kelompok-kelompok dan elite-elite kunci di dalam masyarakat.

Kerangka pembuatan keputusan kebijakan *korporatis* berbeda dengan pluralis. Dikatakan oleh Schmitter (1974: 934-6) bahwa, korporatisme didefinisikan sebagai sistem representasi kepentingan di mana unit-unit konstituennya diorganisasikan dalam sejumlah kategori yang terbatas, tunggal, wajib, nonkompetitif, hierarkis, dan diakui atau diizinkan (jika bukannya diciptakan)oleh negara dan diberi monopoli representasional di dalam kategori masing-masing. Pemberian ini ditukar dengan kepatuhan pada kontrol pada pemilihan pemimpin mereka, dan artikulasi tuntutan dan dukungan.Wyn Grant (dalam Parson,2006:260) menawarkan definisi komprehensif korporatisme lain, yakni sebagai proses yang melibatkan intermediasi dan negosiasi kepentingan: ”*.. antara agen negara dan organisasi kepentingan yang muncul dari divisi kerja di dalam masyarakat, di mana kesepakatan kebijakan diimplementasikan melalui kolaborasi organisasi kepentingan dan kesediaan serta kemampuan mereka untuk menjamin permintaan anggota-anggotanya”.* Ciri utama dari pendekatan korporatis untuk pembuatan keputusan adalah penekanan pada upaya pemerintah dalam melakukan tawar-menawar dan negosiasi dengan kepentingan-kepentingan *(interests).*

Kerangka *Profesionalisme* dalam pembuatan keputusan kebijakan memusatkan perhatian sejauh mana elite profesional mendapatkan kekuasaan dalam pembuatan keputusan.profesionalisme akan bertahan dalam diskurs yang sudah banyak mengalami penyesuain, dimana pengetahuan, keahlian, dan pandangan profesional akan harus lebih banyak dinegosiasikan dan diperdebatkan ketimbang diterima begitu saja seperti dimasa lalu.

Kerangka *teknokrasi* dalam pembuatan keputusan kebijakan memandang adanya aplikasi prinsip ilmiah dan teknologi kedalam organisasi sosial, politik, dan ekonomi. Jika ingin menghindari chaos, para teknokrat mengatakan bahwa masyarakat harus direorganisasikan secara fundamental sehingga problem dapat ditangani secara ilmiah.

Daftar Pustaka

Cohen,M.J,March and Olsen.1972. ***A Garbage Can Model of Organizational Choice.*** Administrative Science Quarterly, 17:1-25

Duadji, Noverman. 2012. ***Laporan Hasil Penelitian Mandiri : : Evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandar Lampung***. FISIP Universitas Lampung Bandar Lampung: Tidak Diterbitkan.

Frederickson, H. George. And Kevin B.Smith. 2012. ***The Public Administration Theory Primer.*** Philadelphia (USA). Westview Press.

Kingdom,J.W. 1984. ***Agendas, Alternatives and Public Policies***. Little Brown.Boston Mass.

March, J.G.1988. ***Decision and Organization***. Blackwell.Oxford.

Parson,Wayne.2006. Public Policy : ***Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan***. Kencana. Jakarta

Smith,M.J. 1993. ***Pressure Power and Policy: State Autonomy and Policy Network in Britain and The United States.*** Harvester Wheatsheaf.

Schmitter,P.C. 1974. ***Still The Century of Corporatism.* Review of Politics*, 36: 85-131***

Tresiana, Novita. 2013. ***Laporan Hasil Penelitian Mandiri : Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan: Diskursus perspektif Garbage Can Theory tentang Cara atau Tujuan dalam Formulasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan di Kota Bandar Lampung***. FISIP Universitas Lampung: Tidak Diterbitkan.

Triana, Rochayati Wahyuni. 2010. ***Global Warning: Quo Vadis Ilmu Administrasi Negara*** dalam Suaedi, Falih dan Wardiyanto, Bintoro. 2010:191. ***Rivitalisasi Administrasi Negara***. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pemerintah Kota Bandar Lampung-Tim Peneliti Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2011. ***Dokumen Laporan Akhir: Studi Kelayakan Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Bandar Lampung*.**

William,Dunn. 2000. ***Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua***. Gajahmada University Press. Yogyakarta

Wicaksono, Kristian Widya dan Ismail, Hubertus Hasan,. 2013. ‘***Penerapan prinsip-Prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia: Sebuah telaah kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip-Prinsip Administrasi*’** dalam ‘***Jurnal Bina Praja: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri’. Vol. 5 No. 3 September 2013. ISSN 2085-4323. Halaman 65***. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri